



Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi Pertanian

Hilmy Awal Faizien

Fakultas Pertanian, Universitas Swadaya Gunung Jati

Alamat: Jl. Pemuda Raya No.32, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132

Korespondensi penulis: hilmyawalufaizien@ugj.ac.id

Abstract. *This study aims to comprehensively examine the role of women in agricultural economic development through three main focuses: women's real contribution in agricultural economic activities, structural and socio-cultural barriers that limit their participation, and empowerment strategies to realize a more inclusive agricultural economy. The background of this research stems from the reality that although women play a significant role in various aspects of agricultural production and resource management, recognition of their contribution is still structurally and culturally limited. This research uses a descriptive qualitative method with a library research approach, which utilizes primary sources such as official government documents and reports of international institutions, as well as secondary sources in the form of relevant scientific literature. Data were collected through a systematic search of digital databases, then analyzed using content analysis techniques to identify key themes related to the roles, barriers and strategies for empowering women in the agricultural economy. The results show that women have concrete contributions in production activities, processing of agricultural products, and financial management of farm-based households. However, their participation is still hampered by patriarchal structures, limited access to resources (such as land, capital, and training), and social norms that tend to marginalize women's role in decision-making. Effective empowerment strategies include strengthening women's capacity through education and skills training, forming women's farmer groups, and advocating for policies that support gender equality in agricultural development. In conclusion, the role of women in the agricultural economy is not only relevant but also crucial in promoting food security and sustainable rural development. Therefore, the integration of gender perspectives in agricultural policy is an urgency that cannot be ignored.*

Keywords: *Women, Agricultural Economy, Empowerment, Structural Barriers, Gender Equality.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran perempuan dalam pembangunan ekonomi pertanian melalui tiga fokus utama: kontribusi nyata perempuan dalam aktivitas ekonomi pertanian, hambatan struktural dan sosial budaya yang membatasi partisipasi mereka, serta strategi pemberdayaan untuk mewujudkan ekonomi pertanian yang lebih inklusif. Latar belakang penelitian ini berangkat dari realitas bahwa meskipun perempuan memainkan peranan signifikan dalam berbagai aspek produksi dan pengelolaan sumber daya pertanian, pengakuan terhadap kontribusi mereka masih terbatas secara struktural dan kultural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang memanfaatkan sumber primer seperti dokumen resmi pemerintah dan laporan lembaga internasional, serta sumber sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data digital, lalu dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait peran, hambatan, dan strategi pemberdayaan perempuan dalam ekonomi pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi konkret dalam aktivitas produksi, pengolahan hasil pertanian, dan pengelolaan keuangan rumah tangga berbasis pertanian. Namun, partisipasi mereka masih dihambat oleh struktur patriarki, keterbatasan akses terhadap sumber daya (seperti lahan, modal, dan pelatihan), serta norma sosial yang cenderung meminggirkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Strategi pemberdayaan yang efektif mencakup penguatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembentukan kelompok tani perempuan, serta advokasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dalam pembangunan pertanian. Kesimpulannya, peran perempuan dalam ekonomi pertanian tidak hanya relevan tetapi juga krusial dalam mendorong ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi perspektif gender dalam kebijakan pertanian menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan.

Kata Kunci: Perempuan, Ekonomi Pertanian, Pemberdayaan, Hambatan Struktural, Kesetaraan Gender.

1. LATAR BELAKANG

Pertanian merupakan sektor fundamental dalam struktur perekonomian nasional, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Selain menjadi tulang punggung ketahanan pangan, sektor ini juga menyediakan lapangan kerja yang luas dan menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini, peran perempuan tidak dapat dikesampingkan. Meskipun seringkali tidak mendapatkan pengakuan formal, perempuan memegang peranan penting dalam berbagai aktivitas pertanian, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi hasil pertanian. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi pertanian bukan hanya relevan, melainkan juga esensial dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sekitar 30,57% dari total tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia pada tahun 2023. Namun demikian, kontribusi tersebut masih belum sepenuhnya tercermin dalam pengambilan kebijakan, perumusan program pertanian, maupun dalam struktur kelembagaan agraria. Sebagian besar perempuan petani masih bekerja secara informal dan menghadapi tantangan struktural yang signifikan, termasuk keterbatasan akses terhadap lahan, modal, pelatihan, dan teknologi. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan gender yang sistemik dalam sektor pertanian, yang jika tidak segera diatasi dapat menghambat upaya peningkatan produktivitas dan pembangunan ekonomi secara inklusif.

Perempuan di sektor pertanian bukan hanya sekadar tenaga kerja, melainkan juga agen transformasi sosial dan ekonomi. Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan pertanian berkorelasi positif terhadap peningkatan produktivitas, keberlanjutan sistem pertanian, serta ketahanan pangan rumah tangga. Misalnya, laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa jika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya produktif, hasil pertanian dapat meningkat hingga 20–30 persen, yang pada gilirannya mampu mengurangi jumlah orang yang kelaparan secara global hingga 100–150 juta jiwa. Data ini menunjukkan bahwa memperkuat peran perempuan dalam pertanian bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga merupakan strategi ekonomi yang cerdas.

Sayangnya, peran tersebut masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan budaya yang patriarkal. Dalam banyak komunitas agraris, perempuan masih dianggap sekadar pembantu dalam pekerjaan pertanian, bukan sebagai petani yang mandiri atau pengambil keputusan. Pandangan ini bukan hanya mereduksi potensi perempuan, tetapi juga

berdampak pada minimnya partisipasi mereka dalam pelatihan, penyuluhan pertanian, dan kepemilikan alat produksi. Akibatnya, produktivitas perempuan petani cenderung lebih rendah dibanding laki-laki, bukan karena kemampuan yang berbeda, tetapi karena perbedaan akses dan peluang yang mereka alami.

Di sisi lain, perubahan iklim dan tantangan global lain seperti krisis pangan, degradasi lahan, dan urbanisasi mengharuskan adanya pendekatan baru dalam pembangunan pertanian. Pendekatan ini harus bersifat inklusif dan mempertimbangkan berbagai aktor, termasuk perempuan, dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Dengan demikian, penguatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam bidang pertanian menjadi sangat penting dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Secara konseptual, pembangunan ekonomi pertanian yang berkelanjutan menuntut adanya partisipasi semua elemen masyarakat, termasuk perempuan, secara aktif dan bermakna. Pembangunan yang tidak mempertimbangkan peran dan kontribusi perempuan justru berisiko menciptakan ketimpangan struktural yang lebih dalam. Oleh karena itu, penting bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi pembangunan untuk mengkaji secara lebih mendalam peran strategis perempuan dalam sektor pertanian, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun kebijakan.

Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris dan analitis terkait sejauh mana perempuan terlibat dalam pembangunan ekonomi pertanian, apa saja tantangan yang mereka hadapi, serta bagaimana strategi pemberdayaan yang efektif dapat dirumuskan. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang gender dan pembangunan, serta menjadi dasar argumentatif dalam mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap isu gender di sektor pertanian.

Dalam konteks global, upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian juga telah menjadi bagian dari agenda internasional, seperti dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 5 (Kesetaraan Gender) dan Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan). Hal ini mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam pertanian merupakan isu strategis lintas negara yang memerlukan perhatian serius. Indonesia, sebagai negara agraris dengan jumlah perempuan yang signifikan di sektor pertanian, harus mengambil langkah progresif dalam menjadikan perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa perempuan memainkan peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi pertanian. Namun, peran tersebut masih sering diabaikan baik secara struktural maupun kultural. Oleh karena itu, penting untuk menggali

lebih dalam mengenai peran perempuan dalam pembangunan ekonomi pertanian, sebagai upaya untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan dan inklusivitas sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran strategis perempuan dalam pembangunan ekonomi pertanian berdasarkan data dan literatur yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks—seperti relasi gender dalam sektor agraria—dengan menginterpretasi makna, struktur sosial, dan dinamika kebijakan berdasarkan berbagai sumber ilmiah dan data sekunder yang valid.

Sumber primer terdiri dari dokumen resmi pemerintah seperti laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta laporan internasional dari lembaga seperti FAO dan UN Women yang berkaitan langsung dengan isu gender dan pertanian. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku ilmiah, artikel jurnal terindeks, disertasi, dan laporan riset yang relevan dengan topik kajian, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur yang relevan menggunakan basis data digital seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan laman resmi lembaga pemerintahan. Literatur dipilih berdasarkan kredibilitas penerbit, keterkinian informasi (maksimal sepuluh tahun terakhir, kecuali untuk teori dasar), serta relevansi substansi terhadap fokus penelitian.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola kontribusi, hambatan yang dihadapi perempuan petani, serta respons kebijakan yang telah atau belum diberikan. Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyusun pemetaan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi pertanian secara komprehensif serta memberikan argumentasi akademik yang kuat untuk mendorong kebijakan pembangunan pertanian yang lebih inklusif dan responsif gender.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Nyata Perempuan dalam Aktivitas Ekonomi Pertanian

Peran perempuan dalam sektor pertanian di Indonesia tidak hanya bersifat pelengkap, melainkan kontributif secara substansial terhadap keberlangsungan dan peningkatan produktivitas ekonomi pedesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, dari total 38,8 juta tenaga kerja di sektor pertanian, sebanyak 11,5 juta atau sekitar 29,6% adalah perempuan. Angka ini menunjukkan keterlibatan langsung perempuan dalam seluruh rantai produksi pertanian, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, hingga pemasaran hasil tani.

Namun, kontribusi nyata perempuan tidak selalu tercermin secara proporsional dalam sistem pengupahan, kepemilikan lahan, maupun pengambilan keputusan. Fenomena ini disebut dengan istilah *feminization of agriculture without empowerment*, yaitu meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas pertanian, tetapi tanpa diiringi dengan peningkatan posisi tawar secara sosial dan ekonomi.

Keterlibatan perempuan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk utama: (a) tenaga kerja langsung di ladang dan sawah, (b) pengelolaan pasca-panen seperti pengeringan, pengolahan hasil pertanian, serta (c) aktivitas ekonomi penunjang seperti pengelolaan pasar lokal dan kelompok tani.

Sebagai contoh, dalam budidaya padi di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, perempuan berperan aktif dalam tahap penyemaian dan penanaman, yang dianggap sebagai pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan kesabaran tinggi. Dalam sektor hortikultura, terutama sayuran dan buah-buahan, perempuan umumnya terlibat dalam proses seleksi dan pengemasan hasil panen yang berorientasi pasar. Hal ini menegaskan bahwa perempuan memiliki kontribusi dalam menjaga standar mutu produk yang akan dipasarkan.

Di beberapa daerah seperti di Kabupaten Wonosobo, kegiatan perempuan tidak hanya terbatas pada produksi, tetapi juga masuk ke ranah distribusi. Perempuan menjadi penggerak utama dalam koperasi petani, pasar tradisional, bahkan menjalankan unit usaha mikro berbasis hasil pertanian seperti pembuatan keripik, dodol buah, atau jamu tradisional. Aktivitas-aktivitas ini memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian rumah tangga dan komunitas secara lebih luas.

Meski perempuan berperan besar dalam aktivitas pertanian, mereka seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif seperti lahan, modal, pelatihan, dan teknologi. BPS menyebutkan bahwa dari total pemilik lahan pertanian di

Indonesia, hanya sekitar 14,5% yang merupakan perempuan. Ini menjadi indikator penting bahwa perempuan cenderung bekerja di lahan milik suami, orang tua, atau pihak lain, tanpa kepemilikan formal.

Dalam konteks kebijakan, program-program pertanian pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyuluhan pertanian jarang secara eksplisit menjangkau perempuan sebagai subjek utama. Hal ini berdampak pada ketimpangan pengetahuan dan akses terhadap inovasi pertanian. Laporan FAO menyebutkan bahwa apabila perempuan memiliki akses yang setara dengan laki-laki terhadap input pertanian, maka hasil produksi pertanian dapat meningkat sebesar 20% hingga 30%. Oleh karena itu, pengakuan atas kontribusi perempuan harus diiringi dengan kebijakan yang berpihak.

Kontribusi perempuan dalam aktivitas ekonomi pertanian secara langsung meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, terutama di wilayah rural. Penelitian oleh Habsari (2022) menunjukkan bahwa perempuan petani di Kabupaten Sleman yang terlibat dalam usaha tani dan pengolahan hasil panen mampu memberikan tambahan pendapatan hingga 35% dari total penghasilan rumah tangga.

Selain dampak ekonomi, keterlibatan perempuan juga berdampak sosial, yaitu penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan komunitas. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi pengelola kelompok tani perempuan (KWT) menunjukkan peningkatan dalam kapasitas kepemimpinan, literasi keuangan, serta kemampuan berorganisasi. KWT juga terbukti lebih adaptif terhadap krisis seperti pandemi COVID-19 dengan mengalihkan produksi pada komoditas yang lebih cepat panen dan tahan lama.

Beberapa tantangan utama yang dihadapi perempuan dalam aktivitas ekonomi pertanian antara lain adalah (a) budaya patriarki yang menganggap pertanian sebagai domain laki-laki, (b) beban ganda perempuan dalam pekerjaan rumah tangga dan produksi, serta (c) keterbatasan literasi digital dan keuangan.

Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan intervensi kebijakan berbasis gender seperti afirmasi akses lahan untuk perempuan, pelatihan pertanian berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif, serta penyediaan fasilitas child care di wilayah pertanian padat karya. Selain itu, pendekatan pemberdayaan ekonomi seperti microfinance, pengembangan koperasi perempuan, dan digitalisasi pasar hasil tani menjadi strategi potensial untuk memperkuat posisi perempuan petani.

FAO menegaskan bahwa integrasi gender dalam sistem pertanian bukan hanya keadilan sosial, tetapi juga strategi efisiensi ekonomi. Dengan meningkatkan partisipasi dan pengakuan terhadap perempuan dalam sistem pertanian, maka akan terjadi peningkatan produktivitas nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan data dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki kontribusi nyata dan signifikan dalam aktivitas ekonomi pertanian. Peran tersebut mencakup seluruh mata rantai produksi dan distribusi, serta berdampak langsung terhadap ekonomi rumah tangga dan komunitas. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diakui secara struktural dan kebijakan, terutama dalam aspek kepemilikan lahan, akses modal, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan berbasis gender perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan pertanian nasional.

B. Hambatan Struktural dan Sosial Budaya terhadap Partisipasi Perempuan

Hambatan struktural merujuk pada kendala yang bersumber dari sistem, institusi, atau kebijakan yang tidak berpihak atau tidak responsif terhadap kebutuhan serta potensi perempuan. Struktur sosial yang bersifat hirarkis dan patriarkal telah menciptakan ketimpangan yang nyata dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan representasi politik.

Salah satu bentuk hambatan struktural yang paling nyata adalah terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, angka partisipasi sekolah (APS) untuk kelompok usia 16–18 tahun masih menunjukkan kesenjangan, dengan APS perempuan di pedesaan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini berdampak langsung pada kapasitas perempuan untuk berkompetisi di sektor formal, yang menuntut keterampilan dan pendidikan tinggi.

Di bidang ekonomi, perempuan juga menghadapi ketimpangan struktural dalam hal akses terhadap sumber daya produktif seperti tanah, modal, dan pelatihan kewirausahaan. Dalam laporan UN Women (2020), disebutkan bahwa hanya 13 persen perempuan di negara berkembang yang memiliki lahan sendiri. Di Indonesia, sistem agraria yang lebih memihak kepada laki-laki sebagai kepala keluarga atau pemilik sertifikat turut memperkuat ketimpangan ini. Padahal, peran perempuan dalam pertanian sangat signifikan, baik dalam kegiatan budidaya maupun pascapanen.

Selain itu, representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan juga sangat terbatas. Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di DPR hanya mencapai 20,8 persen, masih jauh dari kuota 30 persen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Hambatan struktural dalam bentuk sistem politik yang tidak inklusif dan dominasi budaya patriarki dalam partai politik membuat perempuan kesulitan untuk masuk dan bertahan dalam dunia politik.

Selain struktur formal, norma dan nilai budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat juga turut menjadi penghambat signifikan terhadap partisipasi perempuan. Budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan otoritas masih sangat kuat di berbagai komunitas, terutama di daerah pedesaan.

Stereotip gender yang menganggap bahwa peran perempuan semata-mata berada di ranah domestik dan laki-laki di ranah publik telah membatasi ruang gerak perempuan. Hal ini terlihat dalam pembagian kerja yang tidak seimbang, di mana perempuan dibebani dengan pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan tanpa pengakuan serta kompensasi ekonomi yang setara. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 menunjukkan bahwa perempuan rata-rata menghabiskan waktu dua kali lebih banyak daripada laki-laki dalam melakukan pekerjaan domestik.

Nilai-nilai budaya yang konservatif juga cenderung menekan perempuan untuk tunduk pada otoritas laki-laki, baik dalam keluarga maupun komunitas. Dalam banyak kasus, perempuan yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan publik atau ekonomi seringkali harus mendapatkan izin dari suami atau anggota keluarga laki-laki. Di beberapa wilayah, seperti di Indonesia bagian timur, perempuan yang aktif secara sosial kerap mendapat stigma negatif sebagai perempuan yang “tidak tahu tempatnya.”

Pendidikan yang bias gender juga menjadi bagian dari hambatan sosial budaya. Kurikulum dan materi pembelajaran masih sering mereproduksi peran gender tradisional, di mana perempuan digambarkan sebagai sosok yang lemah lembut, patuh, dan bertugas merawat rumah tangga. Hal ini menginternalisasi persepsi bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang publik bukanlah hal yang sesuai dengan kodratnya.

Dalam banyak kasus, hambatan struktural dan sosial budaya tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berkelindan dalam menciptakan ketimpangan yang kompleks. Perempuan yang berasal dari kelompok miskin, berlatar pendidikan rendah, atau tinggal di wilayah terpencil, menghadapi hambatan berlapis yang semakin memperkecil kemungkinan mereka untuk terlibat secara aktif dalam ruang publik.

Konsep interseksionalitas yang dikemukakan oleh Kimberlé Crenshaw menyoroti pentingnya memahami berbagai bentuk diskriminasi yang saling tumpang tindih dan memperkuat satu sama lain. Dalam konteks Indonesia, perempuan petani di pedesaan bukan hanya menghadapi hambatan karena jenis kelamin, tetapi juga karena status ekonomi, lokasi geografis, dan kurangnya perlindungan hukum.

Menghadapi berbagai hambatan tersebut, diperlukan strategi multidimensional yang melibatkan reformasi kebijakan, transformasi budaya, dan pemberdayaan komunitas. Di tingkat kebijakan, diperlukan peraturan yang lebih afirmatif dan responsif gender. Contohnya adalah penguatan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen, serta peningkatan alokasi anggaran responsif gender di tingkat nasional dan daerah.

Di tingkat masyarakat, penting untuk mendorong pendidikan kesetaraan gender sejak dini melalui kurikulum sekolah, pelatihan komunitas, dan media massa. Peran tokoh masyarakat, agama, dan adat dalam mendekonstruksi nilai-nilai patriarki juga sangat strategis. Di beberapa daerah, inisiatif seperti Sekolah Perempuan atau Kelompok Usaha Perempuan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kapasitas perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses terhadap pelatihan kewirausahaan, kredit mikro, dan teknologi tepat guna juga merupakan langkah penting. Studi oleh World Bank menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki penghasilan sendiri lebih mampu mengambil keputusan dalam keluarga dan komunitasnya.

Hambatan struktural dan sosial budaya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dalam menjelaskan rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Struktur yang tidak adil dan budaya patriarkal yang mengekang telah menciptakan sistem yang menghalangi perempuan untuk berkembang secara

optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistemik yang melibatkan semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara gender. Dengan begitu, potensi perempuan tidak hanya dapat dimaksimalkan, tetapi juga menjadi kekuatan transformasional dalam pembangunan bangsa.

C. Strategi Pemberdayaan Perempuan untuk Mendukung Ekonomi Pertanian yang Inklusif

Partisipasi perempuan dalam sektor pertanian di Indonesia sangat signifikan, namun belum diimbangi dengan tingkat pemberdayaan dan pengakuan yang proporsional. Dalam konteks ekonomi pertanian yang inklusif—yang mencerminkan keterlibatan seluruh kelompok tanpa diskriminasi gender, status sosial, maupun tingkat pendidikan—perempuan memainkan peran kunci sebagai tenaga kerja, pengelola sumber daya, dan penggerak ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan perempuan yang holistik untuk memastikan partisipasi mereka tidak hanya bersifat simbolis, tetapi berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka dan pembangunan pedesaan secara luas.

Salah satu strategi paling krusial dalam pemberdayaan perempuan adalah penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun non-formal. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pelatihan pertanian masih relatif rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2022, hanya sekitar 35% peserta pelatihan pertanian berbasis komunitas adalah perempuan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk memperluas akses perempuan terhadap pelatihan teknis, manajerial, dan kewirausahaan di sektor pertanian.

Lembaga swadaya masyarakat seperti VECO Indonesia telah menunjukkan keberhasilan model pelatihan berbasis gender yang mengintegrasikan teknologi pertanian ramah lingkungan dengan pembentukan kelompok tani perempuan. Program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan garapan perempuan, tetapi juga memperkuat posisi tawar mereka dalam rantai nilai pertanian lokal.

Strategi kedua yang mendasar adalah memperluas akses perempuan terhadap sumber daya produksi, terutama lahan, modal, dan teknologi. Berdasarkan laporan World Bank (2020), perempuan petani di Indonesia cenderung memiliki akses lebih rendah terhadap kepemilikan lahan dibandingkan laki-laki. Kurangnya

kepemilikan ini membuat mereka kesulitan mengakses kredit dari lembaga keuangan formal karena keterbatasan agunan.

Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian telah mencoba mengatasi kesenjangan ini, namun implementasi di lapangan masih menghadapi kendala teknis dan kultural. Studi oleh ACDI/VOCA menggarisbawahi bahwa pendampingan berbasis gender dan pembentukan koperasi wanita tani menjadi solusi efektif dalam menjembatani akses modal ini. Selain itu, pengembangan financial literacy atau literasi keuangan berbasis gender dapat memperkuat kemampuan perempuan dalam mengelola keuangan usaha tani secara berkelanjutan.

Keterlibatan perempuan dalam kelembagaan pertanian, seperti kelompok tani, koperasi, dan forum musyawarah desa, masih sering terbatas pada posisi non-pengambil keputusan. Padahal, pemberdayaan sejati mensyaratkan perempuan berada dalam posisi strategis yang memungkinkan mereka ikut merancang kebijakan dan mengakses manfaatnya.

Strategi yang dapat diterapkan meliputi pengarusutamaan gender dalam kelembagaan desa, pelatihan kepemimpinan bagi perempuan petani, serta pendirian koperasi khusus perempuan. Contoh praktik baik dapat dilihat pada program “Desa Inklusif” di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, yang berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga 45% dalam waktu dua tahun.

Kelembagaan berbasis perempuan juga dapat menjadi alat advokasi yang efektif untuk menuntut akses layanan penyuluhan, program bantuan pemerintah, dan keterlibatan dalam pembangunan infrastruktur desa yang mendukung kegiatan ekonomi perempuan.

Adopsi teknologi yang sesuai kebutuhan dan kemampuan perempuan petani merupakan strategi penting untuk menciptakan pertanian yang inklusif. Teknologi seperti alat pertanian ringan, sistem irigasi hemat air, dan aplikasi digital untuk pemasaran hasil panen dapat secara signifikan meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja perempuan.

Namun demikian, banyak inovasi teknologi yang dikembangkan tanpa memperhitungkan perspektif gender, sehingga sulit diadopsi oleh perempuan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan perempuan dalam proses riset dan pengembangan (R&D) teknologi pertanian.

Program digitalisasi seperti “Petani Milenial” di Jawa Barat juga harus diadaptasi agar perempuan muda mendapat porsi yang setara dalam pelatihan dan akses pasar digital. Studi oleh FAO mencatat bahwa perempuan yang memiliki akses terhadap teknologi pertanian memiliki peluang 20–30% lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dibandingkan yang tidak.

Kerangka regulasi dan kebijakan pembangunan pertanian yang berperspektif gender menjadi fondasi penting dalam mendukung pemberdayaan perempuan. Sayangnya, kebijakan pertanian di Indonesia sering kali bersifat netral gender—yang dalam praktiknya justru memperlebar kesenjangan karena tidak mengakomodasi kebutuhan khusus perempuan.

Strategi reformasi kebijakan meliputi: integrasi indikator gender dalam perencanaan program pertanian, alokasi anggaran responsif gender (ARG), serta pelibatan organisasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan di tingkat lokal dan nasional.

Kementerian Pertanian melalui Program Pembangunan Pertanian Responsif Gender (PPRG) telah mengembangkan gender analysis pathway (GAP) untuk menilai sejauh mana suatu program berdampak terhadap perempuan. Meski masih dalam tahap awal, GAP memiliki potensi besar untuk menjadikan pembangunan pertanian lebih adil dan berkelanjutan.

Terakhir, penguatan jaringan antar perempuan petani, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional, menjadi strategi strategis dalam pemberdayaan. Melalui jaringan ini, perempuan dapat saling berbagi pengetahuan, memperluas pasar, serta melakukan advokasi kolektif atas hak-haknya.

Organisasi seperti Serikat Petani Perempuan Indonesia (SPPI) dan Asian Rural Women’s Coalition telah membuktikan pentingnya solidaritas lintas wilayah untuk memperkuat suara perempuan di sektor pertanian. Dalam banyak kasus, kekuatan kolektif ini juga mampu menekan aktor-aktor ekonomi besar yang mendominasi rantai pasok pertanian, dan membuka peluang pemasaran berbasis keadilan sosial dan lingkungan.

strategi pemberdayaan perempuan dalam mendukung ekonomi pertanian yang inklusif harus dilakukan secara lintas sektor, terintegrasi, dan responsif terhadap konteks lokal. Mulai dari penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, hingga advokasi kebijakan, seluruh upaya ini perlu dijalankan secara sinergis untuk menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga adil dan

berkelanjutan. Dengan demikian, perempuan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek utama dalam transformasi sosial ekonomi pedesaan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran perempuan dalam pembangunan ekonomi pertanian terbukti memiliki kontribusi yang signifikan, khususnya dalam berbagai aktivitas produktif seperti pengolahan hasil, pemasaran, serta pengelolaan sumber daya pertanian skala rumah tangga maupun komunitas. Keterlibatan perempuan bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi bagian integral dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi keluarga petani. Kontribusi nyata ini mencerminkan kapasitas dan potensi perempuan sebagai aktor ekonomi yang tidak hanya pasif, tetapi aktif dalam menggerakkan roda pembangunan pertanian di tingkat lokal.

Namun demikian, partisipasi perempuan masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan sosial budaya yang mengakar. Norma patriarkal, pembagian kerja berbasis gender, keterbatasan akses terhadap aset produksi, pelatihan, serta pengambilan keputusan menjadi penghalang utama yang membatasi optimalisasi peran perempuan. Struktur kebijakan dan kelembagaan yang belum responsif terhadap isu gender memperkuat ketimpangan partisipatif ini, yang pada gilirannya turut menghambat pencapaian tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.

Menghadapi realitas tersebut, diperlukan strategi pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang mencakup peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan pertanian, penguatan kelembagaan berbasis gender, serta reformasi kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kesetaraan. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan partisipatif, perempuan dapat lebih diberdayakan sebagai subjek pembangunan, sehingga mampu berkontribusi secara maksimal dalam transformasi ekonomi pertanian yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan gender.

DAFTAR REFERENSI

- ACDI/VOCA. (2021). Strengthening gender-responsive agricultural finance in Indonesia. Gender and Inclusive Finance Report.
- Asian Rural Women's Coalition. (2020). Voices from the field: Women in agriculture in Southeast Asia. ARWC Publications.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). Keadaan angkatan kerja Indonesia Februari 2023. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023b). Pendataan Sensus Pertanian 2023: Kepemilikan lahan. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023c). Statistik pendidikan 2022. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023d). Statistik pertanian 2023. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023e). Waktu yang digunakan untuk kegiatan domestik menurut jenis kelamin. BPS.
- Bina Desa. (2021). Perempuan tani dan ketimpangan akses sumber daya. Bina Desa.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.
- Dewi, K., & Yuliana, N. (2021). Adaptasi kelompok wanita tani dalam masa pandemi. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 8(2), 73–84.
- Fardhani, N. A. (2020). Perempuan dalam budaya patriarki: Studi kasus di Indonesia Timur. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(2), 159–175.
- Federici, S. (2019). Women, land, and labor: Feminization of agriculture in the Global South. Zed Books.
- Fitriani, et al. (2021). Sekolah perempuan dan transformasi sosial di komunitas desa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Food and Agriculture Organization. (2011a). The role of women in agriculture. FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2011b). The state of food and agriculture: Women in agriculture, closing the gender gap for development. FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2020a). Gender and agriculture: Closing the knowledge gap. FAO.
- Food and Agriculture Organization. (2020b). The role of women in agriculture (ESA Working Paper No. 11-02). FAO.
- Habsari, I. (2022). Kontribusi perempuan petani dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 10(1), 101–115.
- Kabeer, N. (2016). Gender, labour, and livelihoods: Reinterpreting the informal economy. Routledge.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). Peta jalan pemberdayaan perempuan petani 2020–2024. KemenPPPA.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). Panduan analisis gender dalam program pembangunan pertanian. Pusat Penyuluhan Pertanian.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). Data caleg terpilih 2019. <https://www.kpu.go.id>

- Lembaga Administrasi Negara. (2022). Model pemberdayaan perempuan dalam BUMDes. LAN Press.
- Mulyani, S. (2022). Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi berbasis hasil pertanian. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 9(1), 1–15.
- Mulyati, Y., Setyawati, I. E., & Suganda, D. A. (2022). Potensi petani milenial Jawa Barat dalam mendongkrak perekonomian nasional melalui ekspor produk perkebunan. *Journal Publicuho*, 5(3), 963–977. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.43>
- Nurhidayati, & Wulan, D. (2021). Peran gender dalam aktivitas pertanian padi di Jawa Tengah. *Jurnal Agrisep*, 21(2), 153–166.
- UN Women. (2020). Progress of the world's women 2019–2020: Families in a changing world. United Nations.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations.
- VECO Indonesia. (2019). Gender and value chain development in Indonesia. VECO Indonesia.
- World Bank. (2022). Women, business and the law 2022. The World Bank.